



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN  
Tahun 2025-2029**

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan strategis lima tahun yang berfungsi untuk memandu arah pembangunan dan penguatan kapasitas layanan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan tantangan dan kebutuhan masyarakat dalam hal keselamatan dan penanggulangan bencana.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada kerja sama yang erat antara seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan, partisipasi aktif, serta masukan yang konstruktif untuk mewujudkan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang lebih profesional, responsif, dan berdaya saing. Semoga dokumen ini dapat menjadi langkah strategis yang efektif dalam menciptakan rasa aman dan keselamatan bagi seluruh masyarakat.

Tarempa, 15 September 2025

KEPALA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,



WAN MAKHDAR, S.Pd.SD

Pembina Tk. I/IV.d

NIP. 19691101 199310 1 001



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>BAB I</b>   |           |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>   | <b>4</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 4         |
| 1.2 Landasan Hukum.....  | 7         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....   | 10        |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....   | 11        |
| <b>BAB II</b>  |           |
| <b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS...13</b>                         |           |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....  | 13        |
| 2.2 Sumber Daya Aparatur .....   | 15        |
| 2.3 Kinerja Pelayanan .....  | 19        |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....                                     | 26        |
| 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....                           | 29        |
| 2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala<br>Daerah Terpilih..... | 32        |
| 2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....   | 33        |
| 2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup<br>Strategis .....     | 35        |
| 2.9 Penentuan Isu-isu Strategis .....  | 38        |
| <b>BAB III</b>   |           |
| <b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>                                       | <b>41</b> |
| <b>BAB IV</b>  |           |
| <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>                                  | <b>45</b> |
| <b>BAB V</b>   |           |
| <b>PENUTUP .....</b>   | <b>59</b> |



## DAFTAR TABEL

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 2. 1   |     |
| Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan ....                                     | 165 |
| Tabel 2. 2   |     |
| Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....  | 165 |
| Tabel 2. 3   |     |
| Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin.....  | 16  |
| Tabel 2. 4   |     |
| Sarana dan Prasarana Pendukung.....  | 168 |
| Tabel 2. 5   |     |
| Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan<br>Kabupaten Kepulauan Anambas ..... | 20  |
| Tabel 2. 6   |     |
| Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....   | 23  |
| Tabel 2. 7   |     |
| Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran<br>Pembangunan Daerah .....                    | 30  |
| Tabel 3. 1   |     |
| Tujuan dan Sasaran jangka Menengah .....   | 41  |
| Tabel 3. 2   |     |
| Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....  | 43  |
| Tabel 4. 1   |     |
| Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan<br>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .....                  | 46  |
| Tabel 4. 2   |     |
| Indikator Kinerja Perangkat Daerah<br>Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran .....                           | 54  |
| <br>   |     |
| Gambar 2. 1  |     |
| Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan<br>Kabupaten Kepulauan Anambas .....          | 194 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran dan bencana lainnya. Sebagai salah satu pilar penting dalam sistem perlindungan masyarakat, dinas ini bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan efektif dalam pencegahan, penanggulangan, serta mitigasi risiko kebakaran dan penyelamatan. Dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029 menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan kawasan industri serta infrastruktur di wilayah ini telah meningkatkan potensi risiko kebakaran dan kecelakaan lainnya. Di sisi lain, perubahan iklim juga membawa tantangan baru, seperti meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam, yang memerlukan penanganan terpadu dan terencana. Kondisi ini menuntut dinas untuk memiliki visi strategis dan kebijakan yang mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anmbas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini menegaskan pentingnya dokumen perencanaan strategis sebagai instrumen untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan,





pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Dalam konteks ini, Renstra menjadi pedoman operasional yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan ini, Renstra Dinas Pemadam Kebakaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam menyusun Renstra 2025-2029, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah serta prioritas pembangunan nasional yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta modernisasi sarana dan prasarana. Renstra ini juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta masukan dari berbagai pihak terkait, sehingga diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan riil dan menciptakan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rencana strategis ini disusun dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berbasis data yang akurat. Berbagai analisis dan evaluasi terhadap capaian program sebelumnya telah dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan ke depan lebih terarah dan berkelanjutan. Selain itu, dokumen ini juga memuat strategi peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah, swasta, maupun



komunitas, untuk menciptakan sistem perlindungan masyarakat yang lebih komprehensif.

Proses penyusunan dokumen Renstra ini dilakukan dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Bahwa hal ini penting untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar perencanaan yang baik, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui keterbukaan dalam proses perencanaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkomitmen untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga menghasilkan dokumen yang relevan, inklusif dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Melalui Renstra ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, responsivitas, dan keberlanjutan. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan strategi ini sangat bergantung pada sinergi dan dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat dan komunikasi yang efektif akan terus diupayakan untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

Dengan adanya Renstra 2025-2029, diharapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan masa depan sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang aman, tangguh, dan sejahtera. Dokumen ini menjadi pijakan strategis dalam upaya membangun sistem perlindungan yang tangguh serta pelayanan publik yang andal dan terpercaya.



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri





Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;



19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai panduan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap langkah operasional yang dilakukan oleh dinas selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah, serta mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran, penyelamatan, dan bencana lainnya. Renstra ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan semua sumber daya yang dimiliki secara optimal sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas.

#### **b. Tujuan**

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan menekankan pada profesionalisme, kecepatan respons, dan ketepatan tindakan dalam penanganan kebakaran dan bencana lainnya.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, termasuk peningkatan kompetensi, disiplin, dan integritas petugas dalam memberikan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat.



3. Mengembangkan dan memodernisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini.
4. Mengoptimalkan peran pencegahan dan mitigasi risiko kebakaran, termasuk edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kesadaran akan pentingnya keselamatan dan pengurangan risiko bencana.
5. Memperluas sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan pelayanan.
6. Mendukung terciptanya masyarakat yang aman, tangguh, dan sejahtera melalui sistem perlindungan masyarakat yang terpadu dan berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu



solusi pemecahan permasalahan. Serta permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, telaah dan rumusan isu – isu strategis.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Serta strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan

### BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan serta indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### BAB V PENUTUP





## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

b. Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kebakaran dan penyelamatan;



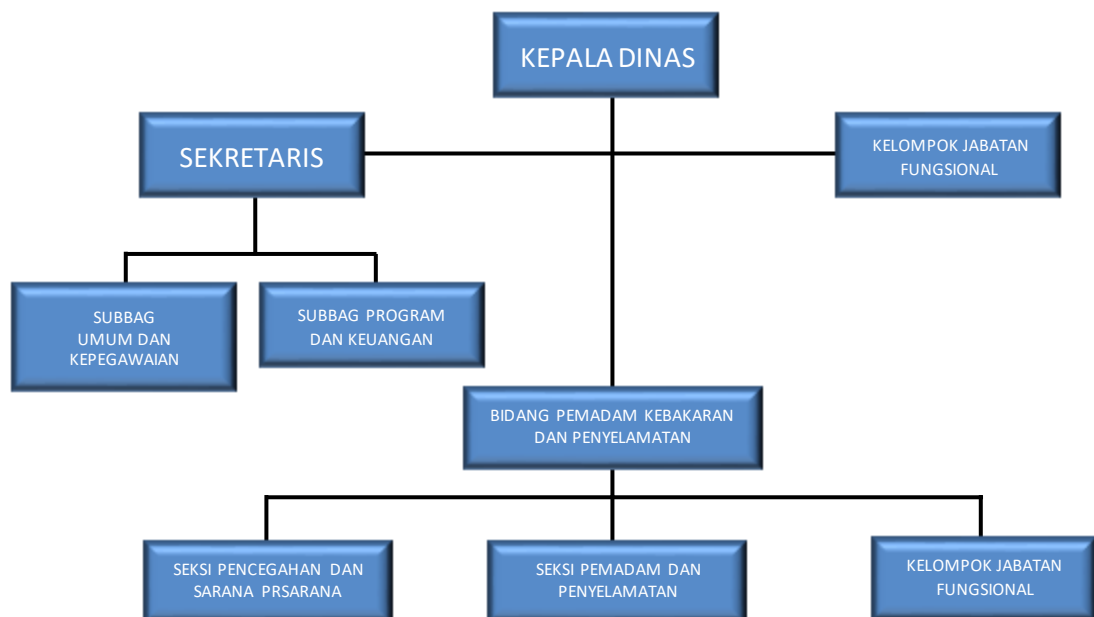
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan;
2. Sekretaris;
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - Subbagian Program dan Keuangan
3. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - Seksi Pencegahan dan Sarana Prasarana
  - Seksi Pemadaman dan Penyelamatan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Lebih lanjut Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2. 1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**



## 2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Per Januari 2025 berjumlah 107 (seratus tujuh) orang terdiri dari 45 Aparatur Sipil Negara dan 62 Pegawai Tidak Tetap. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

### a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan



dan jabatan sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Sumber Daya Aparatur**  
**Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan**

| No     | Golongan                 | Jabatan       | Jumlah   |
|--------|--------------------------|---------------|----------|
| 1      | Penata Tk. I Eselon II.b | Kepala Dinas  | 1 orang  |
| 2      | Pembina Tk. Eselon III.a | Sekretaris    | 1 orang  |
| 3      | Pembina Eselon III.b     | Kepala Bidang | 1 Orang  |
| 4      | Penata Tk. I Eselon IV.a | Kasubbag      | 4 Orang  |
| 5      | Penata Muda / III.a      | Staf PNS      | 3 Orang  |
| 6      | Pengatur Tk. I / II.d    | Staf PNS      | 3 Orang  |
| 6      | Fungsional PPPK          | Staf          | 32 Orang |
| 7      | Pelaksana PPPK           | Staf          | 41 Orang |
| Jumlah |                          |               | 86 orang |

**b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan**

Adapun komposisi pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

| No     | Sumber daya aparatur | Kualifikasi Pendidikan |
|--------|----------------------|------------------------|
| 1      | ASN : 86 Orang       | S2 : 1 Orang           |
|        |                      | S1 : 12 Orang          |
|        |                      | D3 : 1 Orang           |
|        |                      | SMA/SMK : 71 Orang     |
|        |                      | SD : 1 Orang           |
| Jumlah |                      | 86 Orang               |

**Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin**



Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin.

**Tabel 2. 3**  
**Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin**

| Sumber daya aparatur | Laki-Laki | Perempuan |
|----------------------|-----------|-----------|
| ASN                  | 73        | 13        |
| <b>Jumlah</b>        | <b>73</b> | <b>13</b> |

Sumber daya aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan yang responsif, cepat, dan tepat dalam menghadapi situasi darurat seperti kebakaran, kecelakaan, dan bencana lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya aparatur menjadi prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan misi dinas.

Dalam meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya jumlah SDM yang terlatih PUG, serta peningkatan layanan yang responsif terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas di dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan tidak ada perbedaan semuanya sama baik laki-laki maupun perempuan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memberikan bekal





pelatihan khusus kepada pegawai perempuan yang bekerja di dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menangani kebakaran dan penyelamatan.

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terus melakukan pengembangan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Berbagai program peningkatan kapasitas telah dirancang untuk memastikan bahwa setiap petugas memiliki keterampilan teknis, manajerial, dan komunikasi yang memadai. Selain itu, dinas juga berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika pelayanan publik dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas.

Selain aspek kompetensi, jumlah dan distribusi aparatur juga menjadi perhatian utama. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara aktif melakukan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga kerja untuk memastikan bahwa setiap wilayah memiliki akses yang memadai terhadap layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Rekrutmen aparatur dilakukan dengan seleksi ketat untuk menjaring individu yang memiliki dedikasi tinggi dan siap menghadapi risiko dalam menjalankan tugas. Hal ini penting untuk mendukung ketersediaan layanan yang merata di seluruh wilayah kerja dinas.

Dinas juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi aparatur melalui pemberian insentif, pengakuan atas kinerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan pendekatan ini, diharapkan aparatur dapat menjalankan tugasnya dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Sumber daya aparatur yang dikelola dengan baik akan menjadi fondasi



kuat bagi keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat..

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

**Tabel 2. 4**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung**

| No. | Uraian                | Jumlah   | Keterangan |
|-----|-----------------------|----------|------------|
| 1   | Lemari Besi/Metal     | 3 Unit   | 2023       |
| 2   | Meja Ketik            | 5 Unit   | 2023       |
| 3   | Kursi Biasa           | 5 Unit   | 2023       |
| 4   | Alat Pemadam Kapur    | 166 Unit | 2023       |
| 5   | Baju Tahan Api        | 4 Unit   | 2023       |
| 6   | Lap Top               | 3 Unit   | 2023       |
| 7   | Printer               | 2 Buah   | 2023       |
| 8   | Papan Nama            | 1 Buah   | 2024       |
| 9   | Alat Pemadam/Portable | 1 Buah   | 2024       |
| 10  | Lap Top               | 3 Buah   | 2024       |
| 11  | Air Contioning (AC)   | 3 Buah   | 2024       |

### **2.3 Kinerja Pelayanan**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan



keselamatan masyarakat melalui layanan yang profesional dan responsif. Selama periode sebelumnya, dinas telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan layanan terbaik, baik dalam pencegahan maupun penanganan kebakaran dan bencana lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari peningkatan kecepatan respons terhadap laporan kejadian, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penyediaan sarana dan prasarana yang lebih modern. Pelayanan ini juga didukung oleh kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi risiko.

Meskipun telah banyak capaian positif, dinas terus berupaya mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti meningkatnya kompleksitas risiko akibat pertumbuhan kawasan urban dan industri, serta kebutuhan untuk mengadopsi teknologi terkini. Dengan terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, dinas berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;

**Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026**

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi  | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun Ke- |           |           |           |           |           | Realisasi Capaian Tahun Ke- |      |       |       |      |      | Rasio Capaian Tahun Ke- |      |      |      |      |      |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|-------|-------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|------|
|    |  |             |            |                          | 2021                     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2021                        | 2022 | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2021                    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | Nilai Reformasi Birokrasi  | 100         | 100        | 100                      | 0                        | CC (58)   | CC (58)   | CC (58)   | CC (58)   | CC (58)   | 0                           | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2  | Nilai AKIP   | 100         | 100        | 100                      | 0                        | B (65,50) | B (65,50) | B (65,50) | B (65,50) | B (65,50) | 0                           | 0    | 61,21 | 67,76 | 0    | 0    | 0                       | 0    | 93   | 103  | 0    | 0    |
| 3  | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 100         | 100        | 100                      | 0                        | CC (58)   | CC (58)   | CC (58)   | CC (58)   | CC (58)   | 0                           | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 4  | Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya    | 100         | 100        | 100                      | 0                        | 1%        | 1%        | 1%        | 1%        | 1%        | 0                           | 1%   | 1%    | 1%    | 0    | 0    | 0                       | 1%   | 1%   | 1%   | 0    | 0    |
| 5  | Waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan WMK                               | 100         | 100        | 100                      | 0                        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 0                           | 100  | 100   | 100   | 0    | 0    | 0                       | 100  | 100  | 100  | 0    | 0    |
| 6  | Persentase pelayanan pencegahan, penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya | 100         | 100        | 100                      | 0                        | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 0                           | 100% | 100%  | 100%  | 0    | 0    | 0                       | 100% | 100% | 100% | 0    | 0    |



Selama periode 2021-2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencatat berbagai pencapaian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dinas berhasil menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi melalui peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) dengan target kategori CC (58) dan realisasi (0) Tahun 2024. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam aspek akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga menunjukkan peningkatan yang stabil. Dengan target kategori B (65,50) dan realisasi (67,76) Tahun 2024, capaian ini mengindikasikan kemampuan dinas untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program kerja secara efisien dan tepat sasaran. Hasil ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dinas tetapi juga mendukung terciptanya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan dengan target pada kategori CC (58) sepanjang periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan di lapangan terus meningkat, dinas mampu menjaga tingkat kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang responsif dan berkualitas. Salah satu kunci keberhasilan ini adalah penguatan komunikasi publik dan penyediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan.





Dinas juga mencatat keberhasilan dalam cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan kebakaran, non kebakaran, dan bencana lainnya dengan mencapai target 1% dan realisasi 1% setiap tahun. Capaian ini merefleksikan konsistensi dalam memperluas akses pelayanan, khususnya di wilayah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini belum sepenuhnya didukung oleh pengadaan sarana dan prasarana yang lebih modern serta peningkatan kompetensi petugas lapangan.

Waktu tanggap (response time rate) pelayanan di daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan target 100% dengan realisasi 60% ditahun 2024. Pencapaian ini menunjukkan kemampuan dinas dalam memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap laporan kebakaran dan bencana lainnya, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Selain itu, kecepatan ini menjadi indikator utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan.

Persentase pelayanan pencegahan, penanggulangan kebakaran, non kebakaran, dan bencana lainnya juga mencapai angka 100% setiap tahunnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Hasil ini merupakan bukti nyata dari keberhasilan pelaksanaan program kerja yang terintegrasi, mulai dari sosialisasi pencegahan hingga tindakan penanggulangan di lapangan. Dengan pencapaian yang konsisten ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan terus mampu menghadirkan pelayanan yang lebih optimal dan berdaya guna bagi masyarakat.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu:

**Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Anambas**

| Uraian   | Anggaran Pada Tahun Ke- |      |             |               |               |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |      |             |               |      |      | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |      |      |      |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|--|-------------------------|------|-------------|---------------|---------------|------|-----------------------------------|------|-------------|---------------|------|------|---|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|  | 2021                    | 2022 | 2023        | 2024          | 2025          | 2026 | 2021                              | 2022 | 2023        | 2024          | 2025 | 2026 | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran              | Realisasi |
| Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota                                | 0                       | 0    | 961.799.067 | 8.065.506.816 | 7.928.301.370 | 0    | 0                                 | 0    | 817.589.813 | 6.948.220.413 | -0   | 0-   | 0   | 0    | 85   | 86   | 0    | 0    | 738,58                | 749,84    |
| Administrasi keuangan Perangkat Daerah   | 0                       | 0    | 41.280.000  | 4.679.861.926 | 7.548.873.127 | 0    | 0                                 | 0    | 41.280.000  | 4.080.215.029 | 0    | 0    | 0   | 0    | 100  | 87   | 0    | 0    | 11236,87              | 9784,24   |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                     | 0                       | 0    | 4.800.000   | 10.788.000    | 4.788.000     | 0    | 0                                 | 0    | 4.800.000   | 7.192.000     | 0    | 0    | 0   | 0    | 100  | 66   | 0    | 0    | 124,75                | 49,83     |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 0                       | 0    | 346.756.800 | 0             | 0             | 0    | 0                                 | 0    | 345.196.800 | 0             | 0    | 0    | 0   | 0    | 99   | 0    | 0    | 0    | -100                  | -100      |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 0                       | 0    | 264.631.858 | 601.897.779   | 182.133.613   | 0    | 0                                 | 0    | 196.364.996 | 365.350.457   | 0    | 0    | 0   | 0    | 74   | 60   | 0    | 0    | 127,44                | 86,05     |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah                        | 0                       | 0    | 247.387.909 | 210.776.110   | 98.424.564    | 0    | 0                                 | 0    | 173.949.197 | 140.078.500   | 0    | 0    | 0   | 0    | 70   | 66   | 0    | 0    | -14,79                | -19,47    |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 0                       | 0    | 46.792.500  | 2.520.993.945 | 64.808.410    | 0    | 0                                 | 0    | 45.973.300  | 2.326.974.427 | 0    | 0    | 0   | 0    | 98   | 92   | 0    | 0    | 5287,60               | 4961,57   |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah                     | 0                       | 0    | 10.150.000  | 41.189.056    | 29.273.656    | 0    | 0                                 | 0    | 10.025.520  | 28.410.000    | 0    | 0    | 0   | 0    | 98   | 68   | 0    | 0    | 305,80                | 183,37    |
| Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non 0Kebakaran |                         | 0    | 635.898.000 | 272.285.877   | 110.000.000   | 0    | 0                                 | 0    | 456.574.320 | 185.500.000   | 0    | 0    | 0   | 0    | 71   | 68   | 0    | 0    | -57,18                | -59,37    |

| Uraian  | Anggaran Pada Tahun Ke- |            |             |             |             |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |            |             |             |      |      | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |      |      |      |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|---|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|------|------|---|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|   | 2021                    | 2022       | 2023        | 2024        | 2025        | 2026 | 2021                              | 2022       | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran              | Realisasi |
| Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten /kota | 0                       | 0          | 635.898.000 | 272.285.877 | 110.000.000 | 0    | 0                                 | 0          | 456.574.320 | 185.500.000 | 0    | 0    | 0   | 0    | 71   | 68   | 0    | 0    | -57,18                | -59,37    |
| Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran serta Perlindungan masyarakat  | 0                       | 27.044.000 | 0           | 0           | 0           | 0    | 0                                 | 26.098.800 | 0           | 0           | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -100                  | -100      |
| Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran  | 0                       | 27.044.000 | 0           | 0           | 0           | 0    | 0                                 | 26.098.800 | 0           | 0           | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -100                  | -100      |



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi berbagai kendala pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang belum memiliki pos di 7 kecamatan lainnya, kurangnya Sarana Prasarana dalam mendukung pelayanan kebakaran serta penyelamatan seperti kendaraan roda dua/tiga/empat, mesin, dan perlengkapan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dalam pengembangan pelayanan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan mengembangkan pelayanan/pos di kecamatan lain yang belum ada pos pemadam kebakaran dan penyelamatan dan diperlukan juga pegawai serta sumber daya manusia. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki tantangan sekaligus peluang yang dapat menjadi pijakan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas ke depan. Tantangan dan peluang ini perlu dipetakan secara komprehensif untuk memastikan pelaksanaan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

### **1. Tantangan**

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan di identifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

#### **a. Kondisi Internal**

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah :

##### **1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur**

Jumlah personel yang belum memadai dan



keterampilan teknis yang masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi kebutuhan layanan yang semakin kompleks.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Beberapa peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan masih menggunakan teknologi lama dan terbatas, sehingga memengaruhi efektivitas operasional di lapangan.

3. Keterbatasan anggaran

Alokasi dana yang terbatas menjadi kendala dalam pengadaan peralatan baru, pelatihan SDM, dan pengembangan program strategis lainnya.

4. Sistem manajemen data yang belum terintegrasi

Belum adanya sistem informasi terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan akurat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

1. Geografis wilayah kepulauan

Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari pulau-pulau yang menyulitkan aksesibilitas dan distribusi layanan secara merata.

2. Peningkatan risiko kebakaran dan bencana lainnya

Pertumbuhan permukiman dan perubahan iklim meningkatkan potensi risiko kebakaran dan bencana alam, sehingga menuntut respons yang lebih cepat dan tepat.





3. Kesadaran masyarakat yang masih rendah

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran dan mitigasi risiko bencana menjadi tantangan dalam mengurangi potensi insiden.

**2. Peluang**

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Dukungan kebijakan nasional dan daerah

Adanya prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional yang mendukung penguatan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

2. Kemajuan teknologi

Perkembangan teknologi memungkinkan pengadaan alat pemadam kebakaran modern, sistem informasi berbasis digital, dan aplikasi pelaporan masyarakat yang mempercepat respons layanan.

3. Kolaborasi dengan pihak eksternal

Peluang kerja sama dengan lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan donor internasional dalam penyediaan sarana dan peningkatan kapasitas SDM.

4. Kesadaran masyarakat yang mulai meningkat

Kampanye publik dan sosialisasi yang intensif mulai membuahkan hasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran dan mitigasi risiko bencana.



5. Potensi peningkatan anggaran

Jika dinas dapat menunjukkan kinerja yang baik dan memenuhi target capaian, peluang untuk mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah daerah dan pusat semakin besar.

6. Penguatan jaringan komunikasi dan transportasi

Investasi infrastruktur di wilayah kepulauan membuka peluang untuk memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas layanan dinas.

## **2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Permasalahan tersebut dapat dirinci berdasarkan masing-masing fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan di Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

Masih terdapat kendala dalam pengumpulan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang optimal dalam menjawab kebutuhan dan tantangan di lapangan.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Koordinasi antar unit kerja dan dengan instansi terkait lainnya sering terkendala oleh perbedaan prioritas, mekanisme kerja, dan keterbatasan komunikasi yang efektif.



### 3. Pembinaan dan Dukungan Administrasi Internal

Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi internal menyebabkan kurangnya efisiensi dan kecepatan dalam pelaksanaan tugas administratif. Selain itu, belum semua unit organisasi memiliki kemampuan yang memadai untuk mengadopsi sistem manajemen modern.

### 4. Supervisi dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan

Mekanisme pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu mendeteksi dan mencegah penyimpangan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang dialokasikan untuk fungsi pengawasan.

### 5. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Inventarisasi dan pemeliharaan aset daerah yang menjadi tanggung jawab dinas belum dilakukan secara optimal, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian data dan potensi kerusakan aset yang tidak terdeteksi secara dini.

### 6. Pengawasan Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Dinas

Belum adanya mekanisme evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan indikator pencapaian tugas, sehingga sulit untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja telah berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan dinas.

Identifikasi permasalahan ini menjadi langkah awal yang penting untuk merumuskan strategi dan langkah perbaikan yang lebih terarah. Dengan memahami tantangan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat merancang program dan



kebijakan yang lebih efektif serta menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:

**Tabel. 2.7 (Tabel. T-B.35.)**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| No | Masalah Pokok                         | Masalah   | Akar Masalah   |
|----|---------------------------------------|---|--|
| 1  | Kebijakan yang kurang efektif         | Kebijakan tidak sepenuhnya berbasis data dan kebutuhan di lapangan                            | Keterbatasan data yang akurat dan kurangnya kapasitas perumusan kebijakan berbasis bukti |
| 2  | Koordinasi lintas instansi yang lemah | Kurangnya sinergi antar unit kerja dan dengan instansi terkait                                | Tidak adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur dan efektif                           |
| 3  | Kapasitas SDM yang belum optimal      | Kurangnya kompetensi SDM dalam mengelola administrasi, supervisi, dan pelaksanaan tugas utama | Pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM belum berjalan secara konsisten                 |
| 4  | Sistem pengawasan yang belum efektif  | Pengawasan belum mampu mencegah penyimpangan dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai target   | Keterbatasan alat, sumber daya, dan sistem pengawasan yang terintegrasi                  |
| 5  | Pengelolaan aset yang tidak optimal   | Inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah tidak sesuai standar                       | Kurangnya sistem manajemen aset yang modern dan minimnya kapasitas pengelolaan           |
| 6  | Layanan masyarakat yang belum merata  | Cakupan layanan di wilayah terpencil masih rendah   | Kondisi geografis yang sulit dijangkau dan kurangnya infrastruktur pendukung             |

Tabel ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas pembangunan, dengan fokus pada penyelesaian akar masalah melalui program dan kegiatan strategis.



## **2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Yang Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam empat (5) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur;
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan;
- 3. Mewujudkan Pelayanan Yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Yang Inovatif;**
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata;
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdapat pada Misi 3 yaitu “Mewujudkan Pelayanan Yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Yang Inovatif”.



## 2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dengan dipandu Visi : *Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri*. Dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola





pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melalui Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan umum, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan Strategis

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
  - (a) Indeks Demokrasi Indonesia.
  - (b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
  - (c) Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
  - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
  - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).



- (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
- (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- 3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
  - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
  - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
  - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
  - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
  - (a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
  - (b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

## **2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, pada pasal 6, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi:



- a. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;
- b. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
- c. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; dan
- d. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman utama dalam penataan ruang. RTRW bertujuan untuk mewujudkan wilayah kepulauan yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis agromarinawisata, minyak dan gas, serta industri ramah lingkungan. Sebagai acuan, RTRW berfungsi untuk menyusun RDTR, perencanaan pembangunan jangka panjang, dan jangka menengah, serta menjadi dasar dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pengembangan tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan hierarki Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pengembangan sistem infrastruktur wilayah dilakukan secara terintegrasi, meliputi jaringan transportasi laut, darat dan udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta fasilitas pendukung



lainnya, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembangunan, dengan fokus pada perlindungan kawasan lindung seperti hutan, daerah resapan air, dan ruang terbuka hijau. Upaya ini diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak melampaui daya dukung lingkungan serta pengembangan infrastruktur mitigasi bencana. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk melalui optimalisasi kawasan pesisir dan pulau kecil berbasis ekosistem, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.

Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Sektor kelautan, agribisnis, pariwisata, dan industri kecil menengah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan daya saing lokal. Selain itu, kawasan strategis, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan, akan dikembangkan secara optimal, dengan tetap mempertahankan keseimbangan fungsi pertahanan, keamanan, dan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Rencana pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang sangat penting untuk menjamin keberhasilan program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu menjadi wilayah yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan RTRW tahun 2023–2043.



## **2.9 Penentuan Isu-isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis merupakan langkah penting dalam proses perencanaan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, isu-isu strategis ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap tugas, fungsi, dan berbagai tantangan serta peluang yang dihadapi. Penentuan ini mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.

### **1. Peningkatan Pelayanan Publik**

Salah satu isu utama adalah meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan penanganan bencana lainnya. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, keterjangkauan wilayah terpencil, serta respon waktu yang belum optimal. Hal ini memerlukan strategi untuk memperluas akses layanan, modernisasi sarana prasarana, dan optimalisasi sumber daya manusia. Dalam peningkatan Pelayanan Publik menggunakan metode Seriousness.

### **2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

Dinas menghadapi tantangan dalam meningkatkan nilai reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Isu ini berfokus pada penguatan tata kelola organisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Upaya reformasi diperlukan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola menggunakan metode Urgency.



### 3. Mitigasi dan Pencegahan Risiko Bencana

Tingginya potensi kebakaran dan bencana lain di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas menjadikan mitigasi dan pencegahan sebagai isu penting. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana menjadi salah satu tantangan utama yang harus diatasi. Strategi komunikasi risiko dan edukasi publik menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Dalam Mitigasi dan Pencegahan Risiko Bencana menggunakan metode Growth.

### 4. Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan barang milik daerah menjadi isu yang krusial karena penting untuk mendukung kelancaran operasional dinas. Tantangan berupa belum optimalnya inventarisasi dan pemeliharaan aset memerlukan solusi berupa implementasi sistem manajemen aset yang modern dan terintegrasi. Dalam Penguatan Kolaborasi dan Sinergi menggunakan metode Urgency.

### 5. Penguatan Kolaborasi dan Sinergi

Koordinasi lintas instansi dan sinergi dengan pihak terkait menjadi tantangan lain yang harus ditangani. Dengan memperkuat kolaborasi, dinas dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam menghadapi situasi darurat dan bencana yang memerlukan kerja sama antar unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam Penguatan Kolaborasi dan Sinergi menggunakan metode Urgency.

Penentuan isu-isu strategis ini menjadi dasar dalam menyusun rencana strategis dan program prioritas yang akan diimplementasikan selama periode 2025-2029. Dengan mengidentifikasi isu-isu utama secara komprehensif, Dinas



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat memastikan langkah-langkah pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.





### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah menjadi langkah strategis untuk memastikan keterpaduan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan penyediaan layanan. Tujuan dan sasaran ini dirancang untuk memberikan arah yang jelas dan fokus pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan risiko kebakaran, dan perlindungan masyarakat.

Tujuan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengacu pada kebutuhan untuk memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan respon cepat terhadap kejadian darurat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mitigasi risiko bencana. Peningkatan nilai reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan indeks kepuasan masyarakat juga menjadi fokus utama dalam kerangka perencanaan ini.

Dengan menetapkan indikator yang terukur untuk setiap tujuan dan sasaran, dinas dapat memantau perkembangan pencapaian secara berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memastikan akuntabilitas, tetapi juga memungkinkan penyesuaian strategi sesuai dengan perubahan kebutuhan dan tantangan. Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk periode 2025-2029. Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan:

**Tabel. 3.1. (Tabel T-C.25.)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

| NO | TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                        | DEFINISI OPERASIONAL   | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- |       |      |      |      |
|----|---|--|---|--|--|-------|------|------|------|
|    |   |  |   |  | 2025   | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel           |  | Nilai Sakip (Predikat)                          |  | B  | BB    | BB   | BB   | A    |
|    |   | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas           | Nilai Sakip (Angka)                             | Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah KKA   | 68   | 68.75 | 70   | 71.5 | 73   |
| 2. | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat |  | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas          |  | B  | B     | B    | BB   | BB   |
|    |   | Meningkatkan pelayanan akibat bencana kebakaran dan penyelamatan | Rata-rata waktu tanggap layanan (response time) | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                     | ≤10  | ≤10   | ≤9   | ≤9   | ≤8   |
|    |   |  | Persentase cakupan layanan kebakaran            | Jumlah cakupan Layanan kebakaran dalam waktu tanggap DIBAGI DENGAN jumlah kejadian kebakaran DIKALI 100% | 70%  | 75%   | 80%  | 85%  | 90%  |



## **B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah menjadi langkah strategis untuk memastikan keterpaduan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan penyediaan layanan. Tujuan dan sasaran ini dirancang untuk memberikan arah yang jelas dan fokus pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan risiko kebakaran, dan perlindungan masyarakat.

Tujuan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengacu pada kebutuhan untuk memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan respon cepat terhadap kejadian darurat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mitigasi risiko bencana. Peningkatan nilai reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan indeks kepuasan masyarakat juga menjadi fokus utama dalam kerangka perencanaan ini.

Dengan menetapkan indikator yang terukur untuk setiap tujuan dan sasaran, dinas dapat memantau perkembangan pencapaian secara berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memastikan akuntabilitas, tetapi juga memungkinkan penyesuaian strategi sesuai dengan perubahan kebutuhan dan tantangan.

Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk periode 2025-2029:



**Tabel. 3.2 (Tab T-C.26)**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| Visi : |   | Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah |  |   |
|--------|---|--|--|---|
| Misi : |   | 3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi   |  |   |
| No     | Tujuan  | Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan  |
| 1      | Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel           | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel   | - Meningkatkan kapasitas SDM dalam tata kelola pemerintahan.                         | - Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).                      |
|        |   |  | - Menerapkan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efektivitas kerja. | - Optimalisasi sistem informasi manajemen kinerja berbasis teknologi.                     |
| 2      | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat | Meningkatnya pelayanan akibat bencana kebakaran dan penyelamatan   | - Modernisasi sarana dan prasarana untuk mendukung waktu tanggap cepat.              | - Penyediaan fasilitas pendukung tanggap darurat yang memadai.                            |
|        |   |  | - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.      | - Peningkatan respons tanggap darurat melalui sinergi lintas sektoral.                    |
|        |   |  | - Memperluas cakupan wilayah layanan kebakaran, terutama di daerah terpencil.        | - Pengembangan infrastruktur layanan kebakaran berbasis kebutuhan wilayah.                |
|        |   |  | - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi risiko kebakaran.   | - Pelaksanaan program edukasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk pencegahan kebakaran. |

Tabel ini menjadi pedoman implementasi tujuan dan sasaran strategis dengan fokus pada langkah-langkah terukur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan layanan kebakaran yang optimal.



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **A. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas, diperlukan program-program yang terstruktur dan terarah. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan pelayanan, memperkuat mitigasi risiko kebakaran, serta meningkatkan perlindungan masyarakat. Seluruh program juga didukung dengan pengalokasian pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas, sehingga implementasi dapat berjalan efektif dan efisien.

Program utama yang akan dilaksanakan mencakup berbagai aspek dari penunjang urusan pemerintahan hingga kegiatan teknis di lapangan. Berikut adalah uraian program dan kegiatan yang menjadi bagian dari rencana kerja dinas:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan untuk mendukung kegiatan administratif dan operasional dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal. Fokusnya meliputi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional.

##### **2. Program Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran serta Non Kebakaran**

Program ini dirancang untuk mengurangi risiko kebakaran dan menangani kejadian kebakaran secara efektif. Kegiatannya mencakup pengadaan dan pemeliharaan peralatan pemadam



kebakaran, pelatihan bagi petugas lapangan, serta penguatan sistem tanggap darurat. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup upaya penanggulangan bencana non kebakaran seperti penyelamatan kecelakaan dan evakuasi dalam kondisi darurat lainnya.

### 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran serta Perlindungan Masyarakat

Program ini berfokus pada perlindungan masyarakat melalui upaya preventif dan edukatif. Kegiatan utama meliputi penyuluhan kepada masyarakat tentang mitigasi risiko kebakaran, simulasi penanganan bencana, dan pengembangan sistem perlindungan masyarakat berbasis komunitas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko kebakaran.

Ketiga program ini akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan program dan ketersediaan anggaran daerah. Dengan pendekatan yang terencana dan terukur, diharapkan seluruh kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 4.1 (Tabel T-C.27.)

**Tabel. 4.3 (Tabel T-C. 27.)**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT                     | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT  | FORMULASI TARGET  | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | KET           |  |
|--|---|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|  |   |   |               | 2025                            |               | 2026          |               | 2027          |               | 2028          |               | 2029          |               | 2030          |               |               |  |
|  |   |   |               | TARGET                          | PAGU          | TARGET        | PAGU          | TARGET        | PAGU          | TARGET        | PAGU          | TARGET        | PAGU          | TARGET        | PAGU          |               |  |
| 1  | 2   | 3   | 4             | 5                               | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            |  |
| UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                     |   |   |               |                                 |               | 9,370,116,463 |               | 9,113,721,676 |               | 9,296,996,007 |               | 9,478,270,438 |               | 9,660,644,870 |               | 9,842,819,301 |  |
| 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                |   |   |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah                   | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah  | Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan (8)*100%                                     | 100%          | 100%                            | 8,689,692,662 | 100%          | 8,124,721,676 | 100%          | 8,206,968,791 | 100%          | 8,288,028,478 | 100%          | 8,370,908,763 | 100%          | 8,464,617,861 |               |  |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat  |   | 86%           | 86%                             |               | 86.5%         |               | 87%           |               | 87.5%         |               | 88%           |               | 91%           |               |               |  |
| 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |   |   |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|  | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah                       | Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah                     | 100%          | 100%                            | -             | 100%          | -             | 100%          | -             | 100%          | -             | 100%          | -             | 100%          | -             |               |  |
| 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah     |   |   |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah                   | 1             | 1                               | 0             | 1             | 0             | 1             | 0             | 1             | 0             | 1             | 0             | 1             | 0             |               |  |
| 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah           |   |   |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|  | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dilumpuhkan dan Diperikan Lingkup Perangkat Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dilumpuhkan dan Diperikan Lingkup Perangkat Daerah | 1             | 1                               | 0             | 1             | 0             | 1             | 0             | 1             | 0             | 1             | 0             | 1             | 0             |               |  |
| 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |   |   |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|  | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100%          | 100%                            | 7,474,869,246 | 100%          | 7,783,298,077 | 100%          | 7,860,533,068 | 100%          | 7,938,540,388 | 100%          | 8,017,327,792 | 100%          | 8,096,903,070 |               |  |
| 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |   |   |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu                                  | 44            | 35                              | 7,395,059,246 | 105           | 7,703,498,077 | 108           | 7,780,733,058 | 110           | 7,859,740,388 | 115           | 7,937,527,792 | 120           | 8,017,103,070 | ASN           |  |
| 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |   |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang telah selesai disusun      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang telah selesai disusun      | 1             | 1                               | 79,800,000    | 1             | 79,800,000    | 1             | 79,800,000    | 1             | 79,800,000    | 1             | 79,800,000    | 1             | 79,800,000    | PPKD          |  |
| 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |   |   |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|  | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                                | Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                              | 100%          | 100%                            | 10,788,000    | 100%          | 4,788,000     | 100%          | 4,788,000     | 100%          | 4,788,000     | 100%          | 4,788,000     | 100%          | 4,788,000     |               |  |
| 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |   |   |               |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah selesai dilaksanakan          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah selesai dilaksanakan          | 1             | 1                               | 10,788,000    | 1             | 4,788,000     | 1             | 4,788,000     | 1             | 4,788,000     | 1             | 4,788,000     | 1             | 4,788,000     | HMD           |  |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT                     |  | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT   | FORMULASI TARGET   | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             | KET        |
|--|--|--|--|---------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|
|  |  |  |  |               | 2025                            |             | 2026   |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |            |
|  |  |  |  |               | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |            |
| 1  |  | 2  | 3  | 4             | 5                               | 6           | 7      | 8           | 9      | 10          | 11     | 12          | 13     | 14          | 15     | 16          | 17         |
| 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |  |  |  |               |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |            |
|  | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                | Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Jumlah BMD yang tercatat lengkap dibagi Total BMD sekiranya tercatat dikalikan 100%  | 100%          | 100%                            | -           | 100%   | -           | 100%   | -           | 100%   | -           | 100%   | -           | 100%   | -           |            |
| 1.05.01.2.05.0002 Pengisian Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            |  | Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                           | Jumlah paket pakain dinas pegawai yang diadkan   | 103           | 105                             | -           | 110    | -           | 115    | -           | 120    | -           | 125    | -           | 130    | -           | Jumlah ASN |
| 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  |  |  |               |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |            |
|  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Jumlah kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan makan-minuman, perjalanan dinas, dan pembayaran honor / jumlah kebutuhan lainnya | 100%          | 100%                            | 445,910,047 | 100%   | 134,128,868 | 100%   | 138,141,103 | 100%   | 142,193,460 | 100%   | 146,286,341 | 100%   | 150,420,151 |            |
| 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia   | 1             | 1                               | 9,475,648   | 1      | 11,005,648  | 1      | 11,605,648  | 1      | 11,605,648  | 1      | 11,605,648  | 1      | 11,605,648  |            |
| 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia   | 4             | 4                               | 97,434,165  | 4      | 50,434,165  | 4      | 50,434,165  | 4      | 50,434,165  | 11     | 50,434,165  | 11     | 50,434,165  |            |
| 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia   | 4             | 4                               | 64,981,434  | 4      | 10,805,000  | 4      | 10,805,000  | 4      | 10,805,000  | 11     | 10,805,000  | 11     | 10,805,000  |            |
| 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia  | 4             | 4                               | 5,238,800   | 4      | 20,288,800  | 4      | 20,288,800  | 4      | 20,288,800  | 11     | 20,288,800  | 11     | 20,288,800  |            |
|  | 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan   | 1             | 1                               | 268,780,000 | 1      | 41,595,255  | 1      | 45,007,490  | 2      | 49,059,847  | 2      | 53,152,728  | 2      | 57,286,538  |            |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT                   |   | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT   | FORMULASI TARGET   | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            | KET |
|--|---|--|--|---------------|---------------------------------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-----|
|  |   |  |  |               | 2025                            |             | 2026   |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |     |
|  |   |  |  |               | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |     |
| 1  |   | 2  | 3  | 4             | 5                               | 6           | 7      | 8          | 9      | 10         | 11     | 12         | 13     | 14         | 15     | 16         | 17  |
| 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah |   |  |  |               |                                 |             |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |     |
|  | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah         | Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan           | Jumlah barang milik daerah yang diadakan/jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah*100% | 100%          | 100%                            | 316,838,346 | 100%   | 38,424,564 | 100%   | 38,424,564 | 100%   | 38,424,564 | 100%   | 38,424,564 | 100%   | 38,424,564 |     |
|  | 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                    | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia          | 0             | 0                               | 48,105,532  | 2      | -          | 3      | -          | 4      | -          | 4      | -          | 5      | -          |     |
|  | 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia                        | 1             | 2                               | 59,424,564  | 3      | 59,424,564 | 4      | 59,424,564 | 4      | 59,424,564 | 5      | 59,424,564 | 21     | 59,424,564 |     |
|  | 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Jumlah Paket Mebel yang tersedia   | 8             | 8                               | 32,222,685  | 8      | -          | 10     | -          | 20     | -          | 30     | -          | 50     | -          |     |
|  | 1.05.01.2.07.0003 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia                              | 2             | 2                               | 177,085,505 | 0      | 38,000,000 | 0      | 38,000,000 | 0      | 38,000,000 | 0      | 38,000,000 | 0      | 38,000,000 |     |
| 1.05.01.2.08 Pengedisaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah              |   |  |  |               |                                 |             |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |     |
|  | Terlaksananya Pengedisaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Cakupan Layanan Pengedisaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan                        | Jumlah kebutuhan jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi/ seluruh kebutuhan jasa*100% | 100%          | 100%                            | 282,659,843 | 100%   | 54,808,410 | 100%   | 54,808,410 | 100%   | 54,808,410 | 100%   | 54,808,410 | 100%   | 54,808,410 |     |
|  | 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1             | 1                               | 76,068,129  | 1      | 21,000,000 | 1      | 21,000,000 | 2      | 21,000,000 | 2      | 21,000,000 | 2      | 21,000,000 |     |
|  | 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia       | 1             | 1                               | 48,586,800  | 1      | 13,808,410 | 1      | 13,808,410 | 2      | 13,808,410 | 2      | 13,808,410 | 2      | 13,808,410 |     |
|  | 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia                         | 1             | 1                               | 158,004,314 | 1      | 20,000,000 | 1      | 20,000,000 | 2      | 20,000,000 | 2      | 20,000,000 | 2      | 20,000,000 |     |

| BIDANG URUAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT   |                   |   |   | INDIKATOR<br>OUTCOME/OUTPUT  | FORMULAI TARGET  | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATOR TARGET |             |            |             |            |               |            |               |            |               | KET        |               |      |
|---|-------------------|---|---|--|--|---------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------|
|   |                   |   |   |  |  |               | 2025                             |             | 2026       |             | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |               |            | 2030          |      |
|   |                   |   |   |  |  |               | TARGET                           | PAGU        | TARGET     | PAGU        | TARGET     | PAGU          | TARGET     | PAGU          | TARGET     | PAGU          |            | TARGET        | PAGU |
| 1   |                   |   |   | 2  | 3  | 4             | 5                                | 6           | 7          | 8           | 9          | 10            | 11         | 12            | 13         | 14            | 15         | 16            | 17   |
|   |                   | Terselenggaranya Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemangaj Urusan Penyelenggaraan Daerah  | Cakupan Layanan Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemangaj Urusan Penyelenggaraan Daerah   | Jumlah bangun milik daerah kondisi baik (kemudian diars, nabel dan pendatan masia/2100%)   | 100%   | 100%          | 58.627.180                       | 100%        | 49.273.656 | 100%        | 49.273.656 | 100%          | 49.273.656 | 100%          | 49.273.656 | 100%          | 49.273.656 |               |      |
|   | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Keadanan Persewaan Deras atau Keadanan Deras, Jajaran                                     | Jumlah Keadanan Persewaan Deras atau Keadanan Deras, Jajaran yang Dipelihara dan  | Jumlah Keadanan Persewaan Deras atau Keadanan Deras, Jajaran yang Dipelihara dan   | 0  | 1             | 26.640.000                       | 0           | -          | 1           | -          | 2             | -          | 2             | -          | 2             | -          | -             |      |
|   | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perbaikan Keadanan Deras atau Keadanan Deras Operasional atau                              | Jumlah Keadanan Deras Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan   | Jumlah Keadanan Deras Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan  | 0  | 1             | -                                | 2           | -          | 2           | -          | 2             | -          | 2             | -          | 2             | -          | -             |      |
|   | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainya  | Jumlah Perlatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara  | Jumlah Perlatan dan Mesin Lainya yang mendukung pemeliharaan   | 5  | 6             | 31.967.180                       | 7           | 29.273.656 | 8           | 29.273.656 | 9             | 29.273.656 | 10            | 29.273.656 | 12            | 29.273.656 |               |      |
|   | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang Dipelihara (Rehabilitasi)   | pemeliharaan Setau dan pasetan gedung kantor yang dipelihara sesuai dengan ketentuan   | 1  | 1             | -                                | 1           | 20.000.000 | 1           | 20.000.000 | 1             | 20.000.000 | 1             | 20.000.000 | 1             | 20.000.000 |               |      |
| 1.05.04 PROGRAM PENGCIKARAN, PENGANGGULANGAN, PESTELAMATAN KEBAKARAN DAN PESTELAMATAN SOS KEBAKARAN   |                   |   |   |  |  |               |                                  |             |            |             |            |               |            |               |            |               |            |               |      |
| Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan yang Berkelanjutan   |                   |   |   | Cakupan layanan pemangaj urusan penyelenggaraan daerah   | Akamasi capaian tay kegiatan/ jumlah total kegiatan (4/100%) | 100%          | 100%                             | 790.423.791 | 100%       | 999.000.000 | 100%       | 1.090.027.216 | 100%       | 1.190.241.960 | 100%       | 1.289.636.107 | 100%       | 1.389.201.490 |      |
| 1.05.04.2.01 Pengembangan, Pengendalian, Pemantauan, Penyelamatan, dan Pemangaj Rahan Berbahaya dan Bencana Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |   |   |  |  |               |                                  |             |            |             |            |               |            |               |            |               |            |               |      |
|   |                   | Terselenggaranya Pengembangan, Pengendalian, Pemantauan, Penyelamatan, dan Pemangaj Rahan Berbahaya dan Bencana Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase hasil pengembangan, pengendalian, pemantauan, penyelamatan, dan pemangaj Rahan Berbahaya dan Bencana Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang pengembangan bidang penyelenggaraan penyelenggaraan dan pengujian pasetan yang dimanfaatkan/ jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang |  |               |                                  |             |            |             |            |               |            |               |            |               |            |               |      |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT   | FORMULASI TARGET   | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |             |        |             |        |             |        |             | KET |
|--|--|--|---------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|
|  |  |  |               | 2025                            |            | 2026   |            | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |     |
|  |  |  |               | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |     |
| 1  | 2  | 3  | 4             | 5                               | 6          | 7      | 8          | 9      | 10          | 11     | 12          | 13     | 14          | 15     | 16          | 17  |
| 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah   | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah   | 3             | 7                               | 26,393,820 | 9      | -          | 10     | 87,679,400  | 10     | 131,518,100 | 10     | 175,358,800 | 10     | 175,358,800 |     |
| 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  | 3             | 7                               | -          | 9      | -          | 10     | -           | 10     | 30,000,000  | 10     | 35,000,000  | 10     | 35,000,000  |     |
| 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran  | 3             | 7                               | -          | 9      | -          | 10     | -           | 10     | -           | 10     | -           | 10     | -           |     |
| 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | 1             | 3                               | -          | 5      | -          | 7      | -           | 0      | -           | 10     | -           | 10     | -           |     |
| 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | 0             | 1                               | -          | 0      | -          | 1      | 40,000,000  | 0      | -           | 2      | 50,000,000  | 3      | 50,000,000  |     |
| 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran   | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknik dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran   | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknik dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran   | 10            | 10                              | -          | 15     | 80,000,000 | 25     | 100,000,000 | 30     | -           | 45     | 100,000,000 | 50     | 100,000,000 | ASN |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT   | FORMULASI TARGET   | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |            |        |             |        |             |        |             | KET |
|--|--|--|---------------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|
|  |  |  |               | 2025                            |      | 2026   |      | 2027   |            | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |     |
|  |  |  |               | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |     |
| 1  | 2  | 3  | 4             | 5                               | 6    | 7      | 8    | 9      | 10         | 11     | 12          | 13     | 14          | 15     | 16          | 17  |
| 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)              | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbarui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkeajahtan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbarui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkeajahtan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | 0             | 0                               | -    | 1      | -    | 0      | -          | 1      | -           | 3      | 150,000,000 | 3      | 150,000,000 |     |
| 1.05.04.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Rencana Indek Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | Jumlah Dokumen Rencana Indek Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)   | Jumlah Dokumen Rencana Indek Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)   | 0             | 1                               | -    | 0      | -    | 0      | -          | 0      | -           | 1      | -           | 1      | 38,565,343  |     |
| 1.05.04.2.01.0012 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran         | Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran   | Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran   | 7             | 10                              | -    | 15     | -    | 25     | -          | 30     | -           | 45     | 50,000,000  | 50     | 50,000,000  | ASN |
| 1.05.04.2.01.0013 Penyusunan Kajian Rencana Indek Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)  | Jumlah Dokumen Kajian Rencana Indek Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)  | Jumlah Dokumen Kajian Rencana Indek Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)  | 0             | 1                               | -    | 0      | -    | 0      | -          | 0      | -           | 1      | -           | 1      | -           |     |
| 1.05.04.2.01.0014 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran                                      | Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran  | Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran  | 2             | 3                               | -    | 0      | -    | 0      | 30,000,000 | 5      | 60,000,000  | 7      | -           | 10     | -           | ASN |
| 1.05.04.2.01.0015 Pemutakhirkan Rencana Indek Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan               | Jumlah Dokumen Rencana Indek Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan  | Jumlah Dokumen Rencana Indek Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan  | 0             | 0                               | -    | 0      | -    | 0      | -          | 1      | 223,722,860 | 2      | -           | 2      | -           |     |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT  |  |  |  | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT   |  | FORMULASI TARGET   |  | BASELINE 2024 |  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             | KET        |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|
|   |  |  |  |  |  |  |  |               |  | 2025                            |             | 2026   |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |            |
|   |  |  |  |  |  |  |  |               |  | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |            |
| 1   |  |  |  | 2  |  | 3  |  | 4             |  | 5                               | 6           | 7      | 8           | 9      | 10          | 11     | 12          | 13     | 14          | 15     | 16          | 17         |
| 1.05.04.2.01.0016 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran  |  |  |  | Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran   |  | Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran   |  | 2             |  | 2                               | -           | 5      | -           | 0      | -           | 5      | 200,000,000 | 25     | -           | 30     | -           | ASN        |
| 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |  |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknik Terkait |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknik Terkait   |  | 30            |  | 35                              | 754,023,371 | 40     | 703,000,000 | 45     | 487,347,816 | 50     | 500,000,000 | 55     | 450,000,000 | 60     | 450,000,000 |            |
| 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga   |  |  |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga   |  | 10            |  | 10                              | -           | 10     | 200,000,000 | 10     | 100,000,000 | 10     | -           | 10     | -           | 10     | -           | MASYARAKAT |
| 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |            |
| Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran   |  |  |  | Persentase inspeksi peralatan proteksi kebakaran   |  | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang pengembangan sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan/ jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan*100% |  | 100%          |  | 100%                            | -           | 100%   | -           | 100%   | -           | 100%   | -           | 100%   | -           | 100%   | -           |            |
| 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran   |  |  |  | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersebaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                           |  | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersebaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran   |  | 3             |  | 7                               | -           | 0      | -           | 0      | -           | 10     | -           | 10     | -           | 10     | -           |            |
| 1.05.04.2.02.0002 Pemeliharaan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran  |  |  |  | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelembagaan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                   |  | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelembagaan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran   |  | 0             |  | 0                               | -           | 0      | -           | 0      | -           | 1      | -           | 0      | -           | 0      | -           |            |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT  | FORMULASI TARGET  | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |             |        |            |        |            |        |            | KET        |
|--|---|---|---------------|---------------------------------|------|--------|------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------|
|  |   |   |               | 2025                            |      | 2026   |      | 2027   |             | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |            |
|  |   |   |               | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |            |
| 1  | 2   | 3   | 4             | 5                               | 6    | 7      | 8    | 9      | 10          | 11     | 12         | 13     | 14         | 15     | 16         | 17         |
| 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran  |   |   |               |                                 |      |        |      |        |             |        |            |        |            |        |            |            |
| Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran   | Persentase hasil pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran   | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan/ jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan*100% | 100%          | 100%                            | -    | 100%   | -    | 100%   | 245,000,000 | 100%   | 45,000,000 | 100%   | 45,000,000 | 100%   | 45,000,000 |            |
| 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya  | 3             | 5                               | -    | 6      | -    | 10     | 45,000,000  | 10     | 45,000,000 | 10     | 45,000,000 | 10     | 45,000,000 | MASYARAKAT |
| 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Peminatan Relawan Pemadam Kebakaran  | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relwan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relwan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya                                     | 1             | 1                               | -    | 0      | -    | 1      | 200,000,000 | 0      | -          | 0      | -          | 1      | -          | REDKAR     |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT   | FORMULASI TARGET  | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |             |        |             | KET |
|--|--|---|---------------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------------|--------|-------------|-----|
|  |  |   |               | 2025                            |      | 2026   |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |             | 2030   |             |     |
|  |  |   |               | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |     |
| 1  | 2  | 3   | 4             | 5                               | 6    | 7      | 8    | 9      | 10   | 11     | 12   | 13     | 14          | 15     | 16          | 17  |
| 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia                                       |  |   |               |                                 |      |        |      |        |      |        |      |        |             |        |             |     |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia                                      | Persentase hasil laporan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi  | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan/ jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan*100% | 100%          | 100%                            | -    | 100%   | -    | 100%   | -    | 100%   | -    | 100%   | 234,277,307 | 100%   | 234,277,307 |     |
| 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis                  | 1             | 0                               | -    | 0      | -    | 0      | -    | 0      | -    | 1      | 234,277,307 | 1      | 234,277,307 |     |





## B. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, khususnya sub-urusan kebakaran. Kinerja penyelenggaraan bidang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan kebakaran, penanggulangan bencana kebakaran dan non-kebakaran, hingga perlindungan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan mitigasi risiko. Dengan didukung sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang terus ditingkatkan, dinas berhasil memperluas cakupan layanan serta meningkatkan waktu tanggap dalam penanganan insiden darurat, meskipun tantangan geografis dan anggaran masih menjadi hambatan.

Pencapaian kinerja yang signifikan juga terlihat dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai AKIP dan indeks kepuasan masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam program pencegahan dan simulasi kebakaran menunjukkan bahwa upaya kolaborasi antara pemerintah dan warga telah berjalan dengan baik. Meski demikian, dinas terus berupaya mengatasi kendala operasional, seperti keterbatasan armada dan kebutuhan pelatihan lanjutan bagi petugas, untuk mencapai pelayanan yang lebih optimal di masa mendatang..

Berikut adalah tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

**Tabel. 4.2 (Tabel T-C.28)**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

| No | Indikator   | Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|---|---|-----------------------------|-------|------|------|------|--|
|    |   |   | 2025                        | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1  | Meningkatnya kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratif | B                                       | B                           | BB    | BB   | BB   | A    | A  |
| 2  | Nilai AKIP  | 67.76                                   | 68                          | 68.75 | 70   | 71.5 | 73   | 73                                       |
| 3  | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas                          | B                                       | B                           | B     | B    | BB   | BB   | BB                                       |
| 4  | Rata-rata waktu tanggap layanan (response time)                 | ≤10                                     | ≤10                         | ≤10   | ≤9   | ≤9   | ≤8   | ≤8                                       |
| 5  | Persentase cakupan layanan kebakaran                            | 70%                                     | 70%                         | 75%   | 80%  | 85%  | 90%  | 90%                                      |

Tabel ini mencerminkan komitmen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Tabel 4.4

Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET |
|----|-------------------|---------|-----------------------|-----|
| 1  | 2                 | 3       | 4                     | 5   |
|    |                   |         |                       |     |
|    |                   |         |                       |     |
|    |                   |         |                       |     |



Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

| NO | INDIKATOR                                       | SATUAN     | TARGET TAHUN |       |      |      |      |       | KET |
|----|---|------------|--------------|-------|------|------|------|-------|-----|
|    |   |            | 2025         | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030  |     |
| 1  | 2   | 3          | 4            | 5     | 6    | 7    | 8    | 9     | 10  |
| 1  | Nilai AKIP                                      | Persentase | 68           | 68,75 | 70   | 71,5 | 73   | 73,77 |     |
| 2  | Rata-rata waktu tanggap layanan (response time) | Menit      | ≤10          | ≤10   | ≤9   | ≤9   | ≤8   | ≤8    |     |
| 3  | Persentase cakupan layanan kebakaran            | Persentase | 70%          | 75%   | 80%  | 85%  | 90%  | 95%   |     |
|    |   |            |              |       |      |      |      |       |     |
|    |   |            |              |       |      |      |      |       |     |
|    |   |            |              |       |      |      |      |       |     |
|    |   |            |              |       |      |      |      |       |     |

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

| NO | INDIKATOR   | SATUAN   | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET |
|----|---|--|--------------|------|------|------|------|------|-----|
|    |   |  | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |     |
| 1  | 2   | 3  | 4            | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10  |
| 1  | persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah layanan pemadam, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadam di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah DIBAGI DENGAN jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota DIKALIKAN 100% | 60%          | 70%  | 75%  | 80%  | 85%  | 90%  |     |

Tabel ini penentu target keberhasilan pencapaian tujuan sasaran renstra melalui indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis untuk merumuskan arah dan prioritas pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, khususnya sub-urusan kebakaran, dalam lima tahun mendatang. Melalui perencanaan yang matang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat mitigasi risiko bencana, dan mengoptimalkan perlindungan masyarakat. Segala upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mencerminkan tekad untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif.

Dalam meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya jumlah SDM yang terlatih PUG, serta peningkatan layanan yang responsif terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas di dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan (DAMKARMAT) kabupaten Kepulauan Anambas bahwa pegawai perempuan masih kurang (17%) dibandingkan pegawai laki-laki (83%), walaupun demikian Dinas DAMKARMAT berupaya memberikan bekal pelatihan khusus kepada pegawai perempuan yang bekerja di dinas DAMKARMAT dalam menangani kebakaran dan penyelamatan. Semoga ke depannya ada penambahan pegawai perempuan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.



Dinas menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat dicapai tanpa dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun mitra kerja lainnya. Oleh karena itu, kerja sama dan sinergi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan semangat kebersamaan, inovasi, dan dedikasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 15 September 2025

KEPALA DINAS PEMADAM

KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,



WAN MAKHDAR, S.Pd.SD

Pembina Tk. I/IV.d

NIP. 19691101 199310 1 001